

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik simpulan bahwa belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Karena apabila semakin tinggi belanja modal maka kinerja keuangan daerah dinilai semakin baik.

Pengalokasian belanja modal secara tepat dapat berkontribusi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sekaligus juga dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Pengalokasian belanja modal yang lebih banyak nantinya dapat membantu masyarakat dalam pembangunan dan juga diperolehnya sumber-sumber keuangan yang berguna untuk meningkatkan pendapatan daerah. Apabila sumber-sumber pendapatan daerah meningkat maka dapat dikatakan pemerintah telah cukup baik dalam mengelola keuangan daerah.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah lebih meningkatkan belanja modal untuk daerah-daerah yang dilihat memiliki potensi sumber daya agar dapat membantu masyarakat dalam pembangunan sehingga pelayanan kepada

masyarakat dapat terpenuhi dengan baik sekaligus dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah.

2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel-variabel bebas seperti belanja rutin, belanja pegawai, pendapatan asli daerah atau lainnya dan untuk alat mengukur kinerja keuangan daerah dapat menambahkan alatukur lainnya seperti rasio ketergantungan daerah, rasio derajat desentralisasi, atau rasio efektifitas PAD.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Hari Priyo. 2006. *Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Kabupaten dan Kota seJawa-Bali)*. Simposium Nasional Akuntansi. Padang.
- Amrozi, Akhmad Imam, 2016. Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah dengan Peandapatan Asli Daerah sebagai variabel intervening (Studi Kasus Pekab/Pemkot Di Jawa Timur. *ISSN Vol. 1 No.1 Februari*. Universitas Islam Lamongan.
- Anggarini, Yunita dkk, 2010. *Anggaran Berbasis Kinerja*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Astiti, Desak dan Mimba, Ni Putu, 2016. "Pengaruh Belanja Rutin dan Belanja Modal pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah". *E-Journal Universitas Udayana. Bali*.
- Darise, Nurlan. 2009. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: PT.Indeks
- Darwanto, dan Yullia. 2007. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, PAD, dan DAU terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal". *SNA X 26 Juli 2007*. Universitas Gadjja Mada Jogjakarta.
- Darwis, Ramadhani2015. Pengaruh Belanja Modal Dan Belanja Pegawai Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat (Studi Empiris Pada Kabupaten dan Kota Provinsi Sumatera Barat). *Arikel Ilmiah 2015*. Universitas Negeri Padang.
- Fathiyah, 2012. Analisis Efisiensi Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2011. *JurnalllmiahUniversitasTanjungpura Volume 12 Nomor 3*.Jambi.
- Florida, Asha. 2007. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Dan Kota di Propinsi Sumatera Utara*. Tesis, Medan
- Ghozali, I. 2008. *Structural Equation Modeling Metode Alternatif dengan PLS*. Badan Penerbit Undip. Semarang
- Halim, Abdul. 2001. *Analisis Deskriptif Pengaruh Fiscal Stress pada APBD Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah*. KOMPAK STIE YO. Yogyakarta.

- Halim, Abdul dan Kusufi, 2014. *Akuntansi Sektor Publik: Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik dari Anggaran hingga Laporan Keuangan, dari Pemerintah hingga Tempat Ibadah. Edisi 2.* Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Kuangan Daerah.* Jakarta: Salemba Empat
- Halim, Abdul. 2008. *Akuntansi Kuangan Daerah Edisi 3.* Jakarta: Salemba Empat
- Halim dan Iqbal, 2012. *Pengelolaan Keuangan Daerah.* Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Havid dan Yanuar, 2011. Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah. *Jurnal ISSN Vol 1 No. 2 Agustus.* Universitas Jenderal Soedirman.
- Mahmudi, 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.* Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. 2004. *Otonomidan Manajemen Keuangan Daerah.* Yogyakarta: ANDI.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru 2016.* Yogyakarta: ANDI Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik.* ANDI. Yogyakarta
- Mardiasmo, 2009. *Akuntansi Sektor Publik.* Yogyakarta: ANDI.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomidan Manajemen Keuangan Daerah.* ANDI. Yogyakarta.
- Nugroho, Fajar dan Rohman, 2012. Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah dengan Peandapatan Asli Daerah sebagai variabel intervening. *Journal Of Accounting Vol.1 No.2.* Universitas Diponegoro.
- Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (perubahan pertama dari Permendagri No. 13 Tahun 2006).
- Peraturan Menteri dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006, transfer pemerintah provinsi.

- Prihastuti, Hygi Asepma dkk, 2015. Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan di Kabupaten/Kota Riau. *Jurnal SOROT Vol.10 No. 2 Oktober*. Universitas Riau.
- Puspitasari, dkk, 2015. Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Intervening (studi kasus kabupaten buleleng). *E-Journal Vol.3 No.1 2015*. Universitas Pendidikan Ganesha.
- Renyowijoyo, Muindro, 2010. *Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non Laba*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Sugiyono,2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatifdan R&D*. Bandung: ALFABETA Bandung.
- Sugiyono,2015. *Statistik Untuk Penelitian*. Bandung: ALFABETA Bandung.
- Sularsodan Restianto,2011. Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah.*Jurnal ISSN 2088-2016*. Purwakerto.
- _____,Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusatdan Pemerintah Daerah.